

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 12 TH 2019 MELALUI PERATURAN DAERAH TERKAIT
REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

**OLEH
DARMONO BUDI UTOMO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
1448 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 12 TH 2019 MELALUI PERATURAN DAERAH TERKAIT
REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Program Studi S3 Ilmu Syariah

Oleh

**Darmono Budi Utomo
NIM. 220311020104**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
1448 H/2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Darmono Budi Utomo

NIM 220311020104

Tempat/Tanggal Lahir Blora, 11 Februari 1973

Program Studi S3 Ilmu Syariah

Fakultas/Pascasarjana Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan”

adalah benar-benar karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis telah diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar dan disertasi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Darmono Budi Utomo
NIM. 220311020104

SERTIFIKAT PLAGIASI TERTUTUP



SERTIFIKAT PLAGIASI TERBUKA



Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Darmono Budi Utomo

NIM: 220311020104

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaluddin. M.Hum

Tanggal, Juni 2026

Pembimbing II



Dr. Ahmad Muhajir, MA

Tanggal, Juni 2026

PENGESAHAN DISERTASI

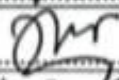
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
12 TAHUN 2019 MELALUI PERATURAN DAERAH TERKAIT
REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Darmono Budi Utomo
NIM: 220311020104

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
pada hari Kamis, 18 Juni 2026

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Ketua)	
2.	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag. M.H (Penguji Utama).	
3.	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Penguji).	
4.	Dr. H. Syaifudin, S.H., M.H (Penguji eksternal).	
5.	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Penguji).	
6.	Ahmad Muhajir MA, Ph.D (Penguji)	
7.	Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc, MA (Penguji/Sekretaris).	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Darmono Budi Utomo (220311020104): *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan.* Pembimbing I: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.; Pembimbing II: Dr. Ahmad Muhajir, M.A. Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Kebijakan Rehabilitasi, Perangkat Hukum Daerah, IPWL, SNI 8807:2022, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan yang menuntut optimalisasi kebijakan rehabilitasi melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang diadopsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika, memeriksa sinkronisasi operasional antar-perangkat hukum daerah, serta merumuskan model rehabilitasi yang ideal di tingkat daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi terkait, wawancara mendalam, serta observasi langsung pada sejumlah Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis menggunakan teori implementasi kebijakan, teori negara hukum, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pada tataran empiris masih menghadapi kendala komunikasi yang belum terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta kelangkaan SDM klinis adiksi. Kondisi ini berimplikasi pada bervariasinya tingkat kepatuhan tata laksana pelayanan di berbagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI 8807:2022). Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi operasional di tingkat kelembagaan pemerintahan daerah masih menemui kendala akibat belum optimalnya peran koordinatif serta adanya ego sektoral pada perangkat hukum kunci seperti Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan BNNP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai solusi keilmuan terhadap problem tersebut, penelitian ini menghasilkan "Model Rehabilitasi Narkotika Integratif Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*" yang mengintegrasikan fase medis, psikososial, spiritual berbasis nilai keagamaan lokal (pesantren), dan reintegrasi sosial dalam satu kesatuan sistem berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, model ini secara konkret mengoperasionalkan kemaslahatan publik melalui perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) pada fase medis-klinis, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) pada fase spiritual keagamaan, serta perlindungan kehidupan sosial (*ḥifẓ al-ijtimā'*) pada fase pascarehabilitasi di tengah masyarakat.

ABSTRACT

Darmono Budi Utomo (220311020104): The Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 through Regional Regulations on the Rehabilitation of Narcotics Addicts in South Kalimantan Province. Supervisor I: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.; Supervisor II: Dr. Ahmad Muhajir, M.A. Postgraduate Dissertation, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2026.

Keywords: *Rehabilitation Policy, Regional Legal Apparatus, IPWL, SNI 8807:2022, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

This research is motivated by the high rate of narcotics abuse in South Kalimantan Province, which demands the optimization of rehabilitation policies through the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019, adopted into the South Kalimantan Province Regional Regulation Number 8 of 2023. This study aims to analyze the implementation of narcotics rehabilitation policies, examine operational synchronization among regional legal apparatuses, and formulate an ideal rehabilitation model at the regional level.

This study employs a normative-empirical juridical research method with a statutory approach and a qualitative approach. Data were collected through document studies of relevant regulations, in-depth interviews, and direct observations at several Institutions Receiving Mandatory Reports (IPWL) in South Kalimantan Province. The data were analyzed qualitatively by utilizing policy implementation theory, the state of law theory (*Rechtsstaat*), and the *maqāṣid al-syarī'ah* approach.

The results show that policy implementation at the empirical level still faces obstacles in unintegrated communication, budget constraints, and scarcity of clinical addiction human resources. This condition implies varying compliance levels of service management in various Institutions Receiving Mandatory Reports (IPWL) towards the Indonesian National Standard (SNI 8807:2022). Furthermore, coordination and operational synchronization at the institutional level face challenges due to suboptimal coordinative roles and sectoral egos among key legal apparatuses, such as the Kesbangpol Agency, the Health Office, and the BNNP of South Kalimantan Province.

As a scholarly solution to these problems, this research formulates the "Integrative Narcotics Rehabilitation Model Based on *Maqāṣid al-Syarī'ah*," which integrates medical, psychosocial, spiritual phases based on local religious values (*pesantren*), and social reintegration into a continuous system. From the perspective of Islamic law, this model operationalizes public interest through the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*) and intellect (*ḥifẓ al-'aql*) in the medical-clinical phase, protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*) in the spiritual phase, and protection of social life (*ḥifẓ al-ijtimā'*) in the post-rehabilitation phase.

ملخص البحث

دارمونو بودي أوتومو، رقم قيد الطالب. 220311020104. " تطبيق لائحة وزير الداخلية رقم 12 لسنة 2019 عبر اللوائح المحلية الخاصة بعلاج وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات في مقاطعة كاليمنتان الجنوبية "، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج. جلال الدين، الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور. أحمد مهاجر، الماجستير. رسالة الدكتوراة، برنامج الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، 2026.

الكلمات المفتاحية: سياسات إعادة التأهيل، الأنظمة القانونية المحلية، مؤسسات تلقي البلاغات المختصر ب (IPWL)، المعيار الوطني الإندونيسي SNI 8807:2022، مقاصد الشريعة.

جاءت هذه الدراسة استجابة للارتفاع المتزايد في معدلات إساءة استعمال المخدرات في مقاطعة كاليمنتان الجنوبية، الأمر الذي يستدعي تعزيز فاعلية سياسات إعادة التأهيل من خلال تطبيق قرار وزير الداخلية رقم 12 لسنة 2019، الذي جرى إدماجه في اللائحة المحلية لمقاطعة كاليمنتان الجنوبية رقم 8 لسنة 2023. وتهدف الدراسة إلى تحليل تطبيق سياسات إعادة تأهيل متعاطي المخدرات، ودراسة مدى التنسيق والتكامل بين الأدوات القانونية المحلية ذات الصلة، واقتراح نموذج مثالي لإعادة التأهيل على المستوى المحلي.

وتعتمد هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري - التطبيقي، من خلال توظيف المقاربة التشريعية، والمقاربة المفاهيمية، والمقاربة السوسولوجية. وقد جمعت البيانات من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة، وإجراء المقابلات المتعمقة، بالإضافة إلى الملاحظة الميدانية المباشرة في عدد من مؤسسات تلقي البلاغات (IPWL) في مقاطعة كاليمنتان الجنوبية. أما تحليل البيانات، فقد أجري وفق المنهج النوعي، بالاستناد إلى نظرية تنفيذ السياسات العامة، ونظرية الدولة القانونية، ومقاربة مقاصد الشريعة بوصفها أداة تحليلية للدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق سياسة إعادة التأهيل على المستوى العملي لا يزال يواجه عددا من التحديات، من أبرزها ضعف التكامل في آليات التواصل والتنسيق، ومحدودية المخصصات المالية، ونقص الكوادر المتخصصة في علاج الإدمان. وقد انعكس ذلك على تفاوت مستويات الالتزام

بمعايير تقديم خدمات إعادة التأهيل في مؤسسات تلقي البلاغات (IPWL)، ومدى تقيدها بالمعيار الوطني الإندونيسي (SNI 8807:2022). كما كشفت الدراسة أن التنسيق والتكامل التشغيلي بين المؤسسات الحكومية المحلية لا يزال يواجه بعض الصعوبات، نتيجة عدم تفعيل الأدوار التنسيقية على النحو المأمول، إلى جانب استمرار النزعة القطاعية لدى بعض الجهات الرئيسة المعنية، مثل هيئة الوحدة الوطنية والسياسة (Kesbangpol)، ودائرة الصحة، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات على مستوى مقاطعة كاليمنتان الجنوبية المختصر ب (BNNP).

واستجابة لهذه الإشكالات، توصلت الدراسة إلى صياغة النموذج التكاملية لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات القائم على مقاصد الشريعة، وهو نموذج يدمج بين الجوانب الطبية، والنفسية والاجتماعية، والروحية المستندة إلى القيم الدينية المحلية المتمثلة في المؤسسات التعليمية الإسلامية (المعاهد)، وإعادة الإدماج الاجتماعي، ضمن منظومة متكاملة ومستدامة. ومن منظور الفقه الإسلامي، يجسد هذا النموذج تحقيق المصلحة العامة بصورة عملية؛ إذ يسهم في حفظ النفس (hifz al-nafs) وحفظ العقل (hifz al-‘aql) من خلال المرحلة الطبية والعلاجية، ويعزز حفظ الدين (hifz al-dīn) من خلال المرحلة الروحية والتربوية، كما يدعم حماية الحياة الاجتماعية (hifz al-ijtimā‘) واستقرارها من خلال مرحلة إعادة الإدماج المجتمعي بعد التأهيل.

MOTTO

Ikhlas dalam menerima, sabar dalam berusaha, dan syukur dalam menikmati setiap anugerah kehidupan. Saya meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang penuh hikmah. Apa yang datang saya terima dengan lapang dada, apa yang belum tercapai saya perjuangkan dengan kesabaran, dan apa yang telah diberikan saya syukuri dengan sepenuh hati. Sebab Allah adalah sebaik-baik Pengatur takdir, yang senantiasa menetapkan segala sesuatu pada waktu dan cara terbaik menurut kehendak-Nya.

**BERDASARKAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Ḍammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut.

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan yā'	Ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan wāw	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سئِلَ *su'ila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Tabel 0.4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ / اِيّ	Fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
اُوّ	Ḍammah dan wāw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditransliterasikan dengan “t”.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “h”.

Apabila pada akhir kata yang bertanda *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl / raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرِّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lām (ال). Dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas:

1. kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلِ *ar-rajulu*
- الْقَلَمِ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ('). Akan tetapi, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: ʾ

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l*, *isim*, maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dalam huruf Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasinya juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: °

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan sebagaimana ketentuan dalam Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului kata sandang, maka huruf kapital tetap digunakan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu*
lillāhi rabbil `ālamīn .
- *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf kapital pada kata “Allah” hanya berlaku apabila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allāhu gafūrun rahīm*

- **لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN

No.	Nama Surat	No.	Nama Surat	No.	Nama Surat
1	<i>Al-Fātiḥah</i>	39	<i>Az-Zumar</i>	77	<i>Al-Mursalāt</i>
2	<i>Al-Baqarah</i>	40	<i>Al-Mu`min</i>	78	<i>An-Naba`</i>
3	<i>Āli `Imrān</i>	41	<i>Fuṣṣilat</i>	79	<i>An-Nāzi`āt</i>
4	<i>An-Nisā`</i>	42	<i>Asy-Syūrā</i>	80	<i>`Abasa</i>
5	<i>Al-Mā`idah</i>	43	<i>Az-Zukhruf</i>	81	<i>At-Takwīr</i>
6	<i>Al-An`ām</i>	44	<i>Ad-Dukhān</i>	82	<i>Al-Infītār</i>
7	<i>Al-A`rāf</i>	45	<i>Al-Jāsiyah</i>	83	<i>Al-Muṭaffifīn</i>
8	<i>Al-Anfāl</i>	46	<i>Al-Aḥqāf</i>	84	<i>Al-Insyiqāq</i>
9	<i>At-Taubah</i>	47	<i>Muḥammad</i>	85	<i>Al-Burūj</i>
10	<i>Yūnus</i>	48	<i>Al-Faṭḥ</i>	86	<i>Aṭ-Ṭariq</i>
11	<i>Hūd</i>	49	<i>Al-Ḥujurāt</i>	87	<i>Al-A`lā</i>
12	<i>Yūsuf</i>	50	<i>Qāf</i>	88	<i>Al-Gāsiyah</i>
13	<i>Ar-Ra`d</i>	51	<i>Az-Zāriyāt</i>	89	<i>Al-Fajr</i>
14	<i>Ibrāhīm</i>	52	<i>Aṭ-Ṭūr</i>	90	<i>Al-Balad</i>
15	<i>Al-Ḥijr</i>	53	<i>An-Najm</i>	91	<i>Asy-Syams</i>
16	<i>An-Naḥl</i>	54	<i>Al-Qamar</i>	92	<i>Al-Lail</i>
17	<i>Al-Isrā`</i>	55	<i>Ar-Raḥmān</i>	93	<i>Aḍ-Ḍuḥā</i>
18	<i>Al-Kahf</i>	56	<i>Al-Wāqi`ah</i>	94	<i>Al-Insyirāh</i>
19	<i>Maryam</i>	57	<i>Al-Ḥadīd</i>	95	<i>At-Tīn</i>
20	<i>Ṭāhā</i>	58	<i>Al-Mujādilah</i>	96	<i>Al-`Alaq</i>
21	<i>Al-Anbiyā`</i>	59	<i>Al-Ḥasyr</i>	97	<i>Al-Qadr</i>
22	<i>Al-Ḥajj</i>	60	<i>Al-Mumtaḥanah</i>	98	<i>Al-Bayyinah</i>
23	<i>Al-Mu`minūn</i>	61	<i>Aṣ-Ṣaff</i>	99	<i>Az-Zalzalah</i>
24	<i>An-Nūr</i>	62	<i>Al-Jumu`ah</i>	100	<i>Al-`Ādiyāt</i>

25	<i>Al-Furqān</i>	63	<i>Al-Munāfiqūn</i>	101	<i>Al-Qāri‘ah</i>
26	<i>Asy-Syu‘arā’</i>	64	<i>At-Tagābun</i>	102	<i>At-Takāsur</i>
27	<i>An-Naml</i>	65	<i>Aṭ-Ṭalāq</i>	103	<i>Al-‘Aṣr</i>
28	<i>Al-Qaṣaṣ</i>	66	<i>At-Tahrīm</i>	104	<i>Al-Humazah</i>
29	<i>Al-‘Ankabūt</i>	67	<i>Al-Mulk</i>	105	<i>Al-Fīl</i>
30	<i>Ar-Rūm</i>	68	<i>Al-Qalam</i>	106	<i>Quraisy</i>
31	<i>Luqmān</i>	69	<i>Al-Ḥāqqah</i>	107	<i>Al-Mā‘ūn</i>
32	<i>As-Sajdah</i>	70	<i>Al-Ma‘ārij</i>	108	<i>Al-Kauṣar</i>
33	<i>Al-Aḥzāb</i>	71	<i>Nūḥ</i>	109	<i>Al-Kāfirūn</i>
34	<i>Saba’</i>	72	<i>Al-Jinn</i>	110	<i>An-Naṣr</i>
35	<i>Fāṭir</i>	73	<i>Al-Muzzammil</i>	111	<i>Al-Lahab</i>
36	<i>Yāsīn</i>	74	<i>Al-Muddaṣṣir</i>	112	<i>Al-Ikhlāṣ</i>
37	<i>Aṣ-Ṣāffāt</i>	75	<i>Al-Qiyāmah</i>	113	<i>Al-Falaq</i>
38	<i>Ṣād</i>	76	<i>Al-Insān</i>	114	<i>An-Nās</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta'ālā atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan.”**

Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pada Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, koordinasi antarinstansi, serta merumuskan model rehabilitasi narkotika integratif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf akademik dan tenaga kependidikan.
3. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H., selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah, dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Promotor, dan Dr. Ahmad Muhajir, M.A., selaku Ko-Promotor, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan disertasi ini.
5. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
6. Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang konstruktif sehingga disertasi ini menjadi lebih baik.

7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman akademik selama penulis menempuh pendidikan doktor.
8. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, Kepala BNN Kota Banjarmasin beserta jajaran, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur RSJ Sambang Lihum, Kepala Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan, Kepala Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin, Kepala Puskesmas Cempaka Banjarbaru, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, serta seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, data, informasi, dan dukungan selama penelitian.
9. Kedua orang tua tercinta, istri, anak-anak, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan moral, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor S3 Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, dan kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, serta menjadi kontribusi bagi penguatan kebijakan dan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di Indonesia.

Akhirnya, hanya kepada Allah Subhānahu wa Ta'ālā penulis memohon semoga segala ikhtiar dan karya ilmiah ini bernilai ibadah serta memperoleh rida-Nya. *Āmīn ya Rabb al-'Ālamīn.*

Banjarmasin, Juli 2026
Penulis,



Darmono Budi Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
PERSETUJUAN DISERTASI	v
PENGESAHAN DISERTASI	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kajian Teori	23
H. Metode Penelitian	45
I. Sistematika Penulisan	57
BAB II PENGATURAN REHABILITASI NARKOTIKA DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM REHABILITASI NARKOTIKA	59
A. Pengaturan Rehabilitasi Narkotika	59
1. Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	59
2. Rehabilitasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	61
3. Rehabilitasi dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan	64
4. Rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL.....	67
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan IPWL	72
6. Rehabilitasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN	77

7.	Rehabilitasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitas P4GN	81
8.	Rehabilitasi dalam SNI 8807:2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan NAPZA	85
B.	Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitas Rehabilitasi	92
1.	Pengertian Pemerintah Daerah	92
2.	Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	96
3.	Otonomi Daerah	98
4.	Kewenangan Pemerintah Daerah	100
5.	Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitas Rehabilitasi	102
BAB III TINJAUAN IMPLEMENTATIF PERMENDAGRI PADA PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENGENAI REHABILITASI NARKOTIKA		106
A.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023: Sebuah Perbandingan ..	106
1.	Konteks Hubungan Regulatif	107
2.	Keselarasan per Aspek Utama	108
B.	Lembaga-Lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan yang Bekerja Sama dalam Penanganan Rehabilitasi	113
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	119
3.	BNNP Kalimantan Selatan	126
BAB IV INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) LAYANAN REHABILITASI NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		136
A.	Konsep IPWL di Provinsi Kalimantan Selatan	136
B.	Kondisi IPWL di Provinsi Kalimantan Selatan	143
C.	Layanan Rehabilitasi pada RSJ Sambang Lihum	150
D.	Layanan Rehabilitasi pada Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan	165
E.	Layanan Rehabilitasi pada Puskesmas Cempaka Banjarbaru	182
F.	Layanan Rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin	200
G.	Layanan Rehabilitasi Narkotika Berbasis Spiritual di Luar IPWL sebagai Penguatan Sistem Rehabilitasi	225
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		254
A.	Analisis Implementasi Kebijakan	255
B.	Analisis Koordinasi Antar Perangkat Hukum	260
C.	Posisi Penelitian dalam Literatur	265
D.	Analisis <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	271
E.	Formulasi Model Rehabilitasi Integratif.....	278
BAB VI PENUTUP		286

A. Simpulan	286
B. Rekomendasi	288

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN